

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa perubahan dalam masyarakat (Cahyono, 2016). Hal ini tidak terlepas dari akses internet yang semakin terjangkau dan tersebar sampai ke pelosok sehingga berdampak terjadinya peningkatan penggunaan media sosial sebagaimana survei yang dikutip dari *We Are Social* sebanyak 49,9% atau sekitar 139 juta dari total populasi Indonesia aktif menggunakan media sosial per Januari 2024. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, maka masyarakat akan semakin efektif dan efisien dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat dan biaya yang tidak terlalu mahal.

Lahirnya media sosial berakibat pada pola perilaku masyarakat sehingga mengalami pergeseran budaya, etika dan norma yang ada. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial sebagai sarana untuk memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik.

Begitu pula bagi instansi pemerintah yang saat ini dituntut untuk menyampaikan informasi yang transparan ke publik, sangat terbantu dengan pesatnya penggunaan media sosial. Media sosial bagi pemerintahan merupakan salah satu inovasi tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan teknologi dan menjadi salah satu jalan keluar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Peran media sosial bagi pemerintah yaitu untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik, sebagai sarana pemerintah untuk lebih dekat dengan publik serta merupakan dokumentasi *online*.

Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya teknologi informasi yang berorientasi pada era digitalisasi modern (*Governance 4.0*) untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Badan BKPSDM Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai adalah saat ini perlu beradaptasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dimana hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang tertuang pada Misi ke-4 Pemerintah Kota Dumai yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik. Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah daerah turut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Aparatur Sipil Negara mempunyai peran penting dalam menentukan suatu kegiatan yang akan dilakukan dalam berjalannya sistem pemerintahan sehingga sebagai penyelenggara pemerintah, aparatur sipil negara berhak mendapatkan informasi secara transparan dan akuntabel sebagai upaya peningkatan kapasitas dan profesionalitasnya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan dalam usaha peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparturnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai belum optimal dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kepala BKPSDM Kota Dumai dalam wawancaranya menyatakan bahwa, "Walaupun kami sudah memiliki website dan media sosial seperti instagram dan facebook tetapi media yang masih sering kami gunakan adalah media konvensional. Mungkin karena apa yang kami tampilkan kurang menarik sehingga pegawai enggan untuk membukanya." Sehingga saat ini BKPSDM Kota Dumai membutuhkan desain konten informasi digital yang efektif agar dapat memberikan layanan dan informasi yang transparan dan akuntabel untuk seluruh ASN di Kota Dumai.

Menurut penelitian Sunarya & Anisah (2018), media yang baik seharusnya dapat memperhatikan aspek-aspek yang mampu memberikan ciri yang khas dari media tersebut, seperti aspek tampilan dan citra maupun unsur-unsur visual yang terstruktur,

sehingga mampu mewakili atau menggambarkan dari apa yang ingin dicapai. Belum adanya desain yang sesuai membuat konten yang disampaikan BKPSDM Kota Dumai tidak efektif dan tepat sasaran, banyak informasi penting yang tertutup oleh postingan ulang kegiatan pemerintahan pusat.

Selain itu, tidak adanya identitas visual membuat tata kelola desain di BKPSDM Kota Dumai menjadi tidak konsisten sehingga informasi disampaikan terlihat membosankan. Menurut Sayatman Dkk (2021), penggunaan identitas visual yang konsisten cenderung lebih memudahkan publik dalam mengidentifikasi dan mengenali ciri entitas dibanding dengan multi identitas.

Mengingat BKPSDM Kota Dumai sedang berupaya untuk meningkatkan partisipasi ASN dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis *e-governance*, maka BKPSDM Kota Dumai perlu memiliki identitas visual, tata kelola desain, konten informasi, dan tampilan desain website dan sosial media Instagram yang sesuai dan kreatif sehingga ASN dapat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di *Governance 4.0* melalui penerapan pelayanan publik berbasis *e-governance*.

1.2 Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. BKPSDM Kota Dumai belum optimal dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
2. Belum adanya tata kelola desain website dan sosial media instagram sehingga konten yang disampaikan tidak efektif dan tepat sasaran;
3. BKPSDM Kota Dumai tidak memiliki identitas visual sehingga tidak ada konsistensi dalam tata kelola desainnya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah “Bagaimana menyampaikan program BKPSDM Kota Dumai agar tersampaikan dengan baik ke seluruh ASN di Kota Dumai?”

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam proses pengerjaan penelitian ini adalah standarisasi identitas visual dan tampilan desain website dan sosial media Instagram pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Dumai. Hasil dari perancangan ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengumpulan data akan dilakukan di Kota Dumai, Riau dan perancangan karya akan dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Perancangan ini dilakukan pada September 2023 hingga Desember 2024 sebagai upaya untuk memperkenalkan dan mengoptimalkan pelayanan BKPSDM Kota Dumai ke ASN.

1.4 Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan ini adalah untuk standarisasi identitas visual dan implementasinya pada desain konten informasi digital seperti website dan sosial media Instagram agar BKPSDM Kota Dumai agar dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh ASN di Kota Dumai

1.5 Metode Penelitian

A. Pengumpulan Data

Dalam perancangan ini, penelitian menggunakan pendekatan penelitian visual. Untuk mengkomunikasikan pesan, karya visual selalu memiliki tiga aspek dalam penelitian visualnya. Tiga aspek tersebut adalah aspek imaji melalui observasi, aspek pembuat melalui wawancara, dan aspek pemirsa melalui kuesioner (Soewardikoen, 2021: 41).

1. Observasi

Menurut Soewardikoen (2021: 48), observasi dalam bidang penelitian visual adalah pengamatan dan pencatatan unsur yang terdapat pada imaji atau gambar. Observasi dapat memberikan persepsi yang nantinya akan menjadi informasi. Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi kantor BKPSDM Kota Dumai untuk mengamati alur kerja pelayanan yang ada dan mengamati desain-desain yang sebelumnya sudah pernah dibuat.

2. Wawancara

Menurut Soewardikoen (2021: 53), wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk menggali pemikiran, konsep, pengalaman pribadi, atau pendapat dari suatu sumber. Wawancara dilakukan bersama dua narasumber, Kepala Badan BKPSDM dan audiens. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang telah lama ada dan konsep pemikiran dan perancangan visual dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam karena metode ini dapat mengungkapkan data khusus yang hanya ada di dalam benak narasumber.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien karena dapat mengumpulkan jawaban dari banyak orang dengan waktu yang relatif singkat (Soewardikoen, 2021: 60). Jenis kuesioner yang digunakan adalah *purposive sampling* untuk ASN di Kota Dumai dengan target 100 ASN. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dan selera visual ASN untuk BKPSDM Kota Dumai.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan data dari sumber kepustakaan seperti jurnal dan buku untuk diolah dan dikutip sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dokumen BKPSDM Kota Dumai seperti Renstra, Renja, jurnal dan buku yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai topik yang diangkat.

B. Analisis Data

Dalam penulisan perancangan ini, data yang didapatkan dianalisis dengan metode:

1. Analisis Matriks Perbandingan

Analisis matriks adalah membandingkan dengan cara menyejajarkan informasi seperti gambar atau tulisan untuk membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penelitian (Soewardikoen, 2021: 111).

Dalam penelitian ini, matriks digunakan untuk membandingkan data seperti layout, tipografi, foto/ilustrasi, warna, konten, sistem desain, dan identitas dari BKPSDM Kota Dumai dengan instansi lainnya agar dapat menarik kesimpulan.

2. Analisis Hasil Wawancara

Analisis hasil wawancara adalah kegiatan merangkum kalimat-kalimat kunci dari hasil wawancara yang kemudian akan digabungkan menjadi pernyataan yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian (Soewardikoen, 2021: 100). Analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan data wawancara yang telah dilakukan bersama kepala badan BKPSDM dan ASN Kota Dumai.

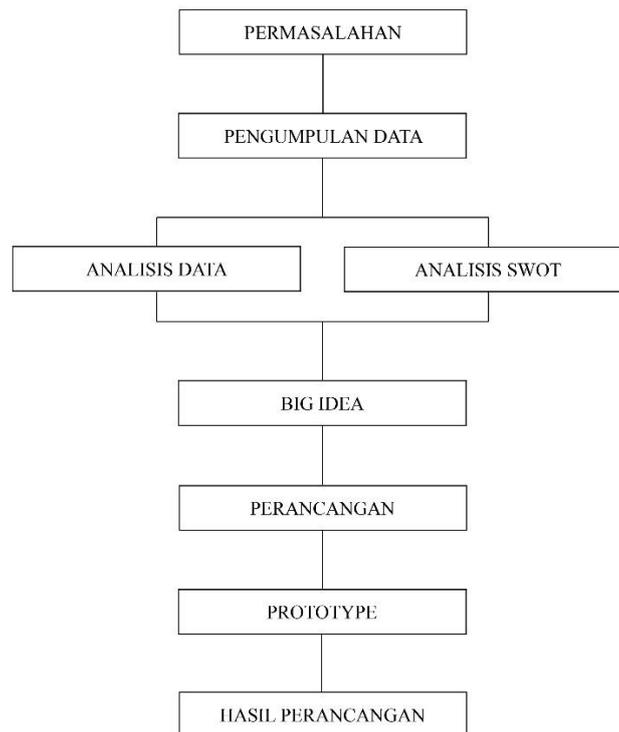
3. Analisis Hasil Kuesioner

Soewardikoen (2021: 106) berpendapat bahwa analisis hasil kuesioner merupakan hasil perhitungan dari setiap unsur yang ditanyakan kepada responden. Jika hasil perhitungan dihubungkan dengan masalah yang terjadi maka akan menjadi perbandingan sebab-akibat. Analisis kuesioner digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil kuesioner yang sebelumnya telah disebar ke beberapa ASN di Kota Dumai. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan desain yang tepat bagi ASN di Kota Dumai.

4. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan melalui faktor eksternal seperti *Opportunities* dan *Threats* dengan faktor internal seperti *Strength* dan *Weaknesses* (Soewardikoen, 2021: 114). Analisis ini digunakan untuk mencari strategi yang ideal untuk perancangan karya.

1.6 Kerangka Penelitian



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian
Sumber: Dokumen Pribadi

1.7 Pembabakan

Sistematika penulisan yang dikerjakan pada Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan tentang fenomena yang terjadi, identifikasi masalah beserta rumusan masalahnya, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, kemudian kerangka penelitian.

BAB II DASAR PEMIKIRAN

Bab ini menjelaskan teori dan dasar pemikiran yang relevan untuk menjadi data pendukung dalam pemecahan masalah dan menjadi pondasi untuk merancang kebutuhan visual dari BKPSDM Kota Dumai.

BAB III DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi data-data yang dikumpulkan dan dibutuhkan untuk kebutuhan perancangan. Data-data yang diperoleh melalui obeservasi, wawancara, studi pustaka ini nantinya akan menjadi konsep dasar yang dibutuhkan untuk perancangan.

BAB IV KONSEP DAN HASIL PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang konsep dan hasil perancangan yang akan dibuat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Dumai melalui data yang telah didapat dan dianalisis sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil perancangan yang telah dilakukan beserta saran yang dibutuhkan untuk penelitian ke depannya.